

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi yang berkembang sangat pesat yang menyebabkan laporan akuntansi banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal ataupun investor. Hal ini menyebabkan orientasi perusahaan hanya tertuju pada pemilik modal saja yang mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali dan dapat merusak lingkungan alam yang akan berdampak pada kehidupan manusia (Setyawanti, 2013). Hal tersebut akan merugikan *stakeholder*.

Setyawanti (2013) mengemukakan bahwa tuntutan publik terhadap perusahaan semakin besar yang memaksa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan para pemilik modal (investor dan kreditor) saja tetapi juga kepentingan karyawan, konsumen serta masyarakat. Dari situlah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial kepada pemilik modal dan juga pihak-pihak diluar manajemen. Oleh karena itu perusahaan diminta agar dapat memberikan informasi mengenai perusahaannya dengan lebih lengkap serta transparan. Informasi-informasi tersebut tertuang dalam laporan tahunan perusahaan yang telah *go public*. Dengan adanya laporan tahunan yang telah *go public* diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat atau penggunanya.

Dari laporan tahunan masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan melaksanakan aktivitas sosialnya serta pertanggungjawaban akibat aktivitas bisnisnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan dapat terpenuhi (Anggraini, 2006).

Menurut kerangka konseptual PSAK tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi untuk para investor dan calon investor serta kreditur dan calon kreditur. Laporan keuangan tersebut nantinya akan dijadikan alat atau acuan dalam pengambilan keputusan (Nurkhayati dan Probohudon, 2014). Dengan adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan secara lebih rasional sehingga hasil yang diperoleh oleh investor atau pemilik akan lebih maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkannya (Sembiring, 2005).

Indonesia mulai melaksanakan konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pada tahun 2008. Konvergensi ini dilakukan secara bertahap dan target penerapan IFRS dapat selesai pada tahun 2012 (Suprihatin dan Tresnaningsih, 2013). Salah satu prinsip dalam *conceptual framework of financial reporting* adalah *full disclosure*, yaitu pengungkapan lengkap semua informasi yang relevan. *Full disclosure* menekankan pada pengungkapan yang lebih luas yang diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*.

Rahayu (2008) menyatakan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *Mandatory Disclosure* (Pengungkapan Wajib) dan *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela). *Mandatory Disclosure* merupakan pengungkapan minimal yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan *Voluntary Disclosure* merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh suatu perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Yunita (2012) menyatakan bahwa dengan pengungkapan sukarela dapat memberikan nilai lebih pada perusahaan. Selain itu dengan pengungkapan sukarela dapat mendorong keyakinan bagi penggunanya seperti investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun pemberian kredit pada perusahaan tersebut. Dengan adanya pengungkapan sukarela pula risiko yang dimiliki perusahaan akan dapat diketahui dan akan mempengaruhi keputusan investor dan kreditur.

Contoh kasus mengenai *Voluntary Disclosure* adalah kasus pada PT. Freeport yang telah lama beroperasi di Timika, Provinsi Papua, sehingga mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya, ternyata masyarakat disekitar perusahaan tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan, banyak yang tidak memperoleh pendidikan, lingkungan sekitar tempat tinggal warga tercemar oleh limbah pertambangan sehingga banyak warga yang menderita berbagai penyakit, bahkan infrastruktur tidak mengalami perbaikan. Hal tersebut akhirnya berujung pada aksi demonstrasi oleh masyarakat dan aktifis lingkungan di Timika, Papua. Hal tersebut terjadi

karena kurangnya tingkat *Voluntary Disclosure* yang dilakukan oleh PT. Freeport (Evadewi, 2014).

Lemahnya penerapan *voluntary disclosure* pada perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari peran mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu alat untuk mengatur jalannya sistem yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012), menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan kedalam tiga variabel yaitu ukuran komisaris independen, *managerial ownership* dan *institutional ownership*.

Terdapat isu yang berkembang dalam *Corporate Governance* yaitu isu mengenai *Board Diversity* yang berbasis *Gender*. *Gender Diversity* yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Para ahli *Corporate Governance* menyatakan bahwa keragaman dewan dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya keragaman dewan tersebut dapat memberikan alternatif-alternatif pengambilan keputusan yang bervariasi dan optimal (Noviwijaya, 2013). Dalam penelitian ini *gender diversity* diproksikan kedalam dua variabel yaitu proporsi dewan komisaris wanita dan proporsi komite audit wanita.

Penelitian mengenai *voluntary disclosure* menjadi penelitian yang penting dan membuat banyak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan berdiskusi mengenai praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* perusahaan dan faktor-faktor penentunya

telah menjadi hal yang menarik untuk diteliti bagi para peneliti akuntansi sejak tahun 1970-an (Chau dan Gray, 2010). Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan, karena pengungkapan informasi sukarela yang tepat akan memberikan informasi yang lebih bagi pengguna informasi. Binh (2012), berhasil melakukan penelitian tentang *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan negara berkembang, yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Penelitian ini mengikuti saran dari penelitian terdahulu untuk pengembangan penelitian, karena sebagian besar penelitian tentang informasi *Voluntary Disclosure* dalam laporan tahunan berpusat di negara maju. Jadi penting dilakukan penelitian yang lebih mendalam di Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Gender Diversity terhadap Voluntary Disclosure (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2014)**”. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Nurkhayati dan Agung (2013), yang berjudul “*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure (Study Pada Perusahaan BUMN di Indonesia)*”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, menambahkan variabel *Gender Diversity*. Penelitian ini menggunakan studi pada semua perusahaan yang *listing* di BEI pada tahun 2013-2014 dan menambah 3 variabel independen, yaitu proporsi komisaris wanita, proporsi

komite audit wanita dan *institutional ownership*. Peneliti ingin menguji apakah hasil dari penelitian ini akan tetap signifikan jika ditambah variabel proporsi komisaris wanita, proporsi komite audit wanita dan *institutional ownership* sebagai variabel independen.

B. Batasan Masalah

Voluntary Disclosure telah menjadi isu yang menarik untuk diteliti dan menyita perhatian praktisi dunia bisnis sebagai metode dalam penentuan proses *Corporate Governance*. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *Voluntary Disclosure* berdasarkan penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini akan diteliti lima faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*, yaitu diantaranya: ukuran dewan komisaris independen, *managerial ownership*, *institutional ownership*, proporsi komisaris wanita, dan proporsi komite audit wanita.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
2. Apakah *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

4. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
5. Apakah proporsi komite audit wanita berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif ukuran komisaris independen terhadap *Voluntary Disclosure*.
2. Untuk menguji pengaruh positif *managerial ownership* terhadap *Voluntary Disclosure*.
3. Untuk menguji pengaruh positif *institutional ownership* terhadap *Voluntary Disclosure*.
4. Untuk menguji pengaruh positif proporsi komisaris wanita terhadap *Voluntary Disclosure*.
5. Untuk menguji pengaruh positif proporsi komite audit wanita terhadap *Voluntary Disclosure*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Teoritis

Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan proporsi komisaris wanita, proporsi komite audit

wanita, ukuran dewan komisaris, *managerial ownership*, kepemilikan institusional, dan *voluntary disclosure*.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukan seperti IAI, Otoritas Jasa Keuangan, Emiten, Investor serta Peneliti/Pembaca.